Volume 3, No. 1 April 2022

CULTOURE JURNAL ILMIAH PARIWISATA BUDAYA HINDU

e-ISSN: 2745-7915
p-ISSN: 2745-7923

MENANGKAL DESAKRALISASI DESTINASI WISATA PURA MELALUI REVITALISASI AJARAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Oleh
I Wayan Rudiarta[1], **Puput Puspita Sari**[2], **Ni Wayan Ariani**[3]
[1,2,3]IAHN Gde Pudja Mataram
[1]iwayanrudiarta@iahn-gdepudja.ac.id, [2]puputpuspitasari58@gmail.com,
[3]arianiwayan203@gmail.com

Abstract
This research aims to describe the results of a scientific study related to efforts to prevent the desacralization of temples as tourist destinations. Based on the fact that many temples have an attraction to be visited by domestic and foreign tourists. On the one hand, the adoption of temples as tourist destinations provides many advantages, especially from an economic perspective. However, irresponsible actions often occur by tourism actors, managers, and tourists themselves. Various cases of temple abuse occurred in Bali, which indicated there was an error in the management of temple tourist destinations. This research uses a qualitative approach with data collection in the form of literature review and technical analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of the studies there are several temples in Lombok become tourist destinations because they are unique in terms of history, place, and shape. The existence of the temple as a tourist destination has challenges in the ethics of entering the temple which spiritually will affect the level of sanctity (sacred) of the temple. To anticipate this, it is necessary to revitalize the teachings of Hindu religious education to all tourism actors through the concepts of Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, and Catur Paramita.
Keyword: desacralization, temple, tourist destinations, Hindu religious education.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan destinasi wisata. Tidak hanya didukung oleh keberadaan topografi dan keindahan pemandangan sebagai destinasi alam, tetapi juga banyak dibuat destinasi wisata (destinasi buatan) yang menarik minat para wisatawan. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan posisi dalam Indeks Daya Saing Pariwisata pada tahun 2019 (sebelum Pandemi Covid-19 melanda), yaitu dari posisi 42 ke posisi 40 dari 140 negara di dunia (Utama & Wiguna, 2020). Pulau Lombok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pengembangan destinasi wisata. untuk pengembangan destinasi wisata. Di Pulau yang dikenal dengan sebutan pura Seribu Masjid ini, penduduknya tidak seluruhnya beragama Islam, tetapi juga ada umat Hindu yang sarat akan tradisi dan budaya.

Keberadaan umat Hindu di Lombok melahirkan banyak destinasi wisata buatan yang merupakan cagar budaya. Pura sebagai tempat suci agama Hindu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan terlebih pura yang memiliki nilai historis dan sejarah panjang. Sebagian besar Pura yang ada di Lombok memang sarat akan nilai Historis, banyak pura yang berdiri pada zaman Kerajaan, yaitu ketika Raja Karangasem mampu menguasai Lombok (Sujana, 2018). Selain itu pula, diyakini bahwa banyak pura yang ada merupakan *petapakan* (napak tilas) dari perjalanan Dang Hyang Dwijendra di pulau Lombok.

Pengamong pura telah melakukan serangkaian analisis sebelum menjadikan pura sebagai salah satu destinasi wisata. Akan tetapi tetap saja hal itu perlu

kesadaran bersama dari seluruh umat untuk turut serta menjaga kesucian pura. Hal penting yang tetap perlu diperhatikan adalah terkait pura sebagai tempat suci, yang mana dalam konsep Hindu tempat suci adalah tempat yang sakral. Sakral identik dengan suci, sehingga upaya menjaga kesakralan pura kerapkali dilakukan dengan menjaga kesucian pura. Namun perlu diingat pula bahwa suci berbeda dengan bersih.

Pengembangan destinasi wisata, termasuk destinasi wisata pura seakan menjadi pisau bermata dua, di samping banyak dampak positif yang dirasakan, ada berbagai dampak negatif yang bisa terjadi. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain terjadinya desakralisasi pura, komersialisasi pura, pementasan benda sakral upacara dalam kegiatan yang bersifat profan, pementasan tari sakral untuk mengundang wisata, dan juga menjadi terlalu tergantung dengan wisatawan asing (Wardhana & Fadhilah, 2014).

Supartika menuliskan dalam bali.tribunnews.com ada beberapa kasus pelecehan tempat suci oleh wisatawan seperti kasus Bule naik ke pelinggih Padmasana Pura Gelap Besakih yang videonya viral pada April 2018, kasus Bule yang naik di pelinggih di Pura luhur Batukaru yang viral di media sosial pada September 2019, dan kasus Bule asal Rusia yang menistakan petirtan *Monkey Forest* Ubud, yang mana air *petirtan* tersebut dipakai membasuh bokong (Supartika, 2019).

Terjadinya berbagai pelecehan tempat suci oleh para wisatawan menunjukkan betapa rawan dan riskannya keberadaan pura sebagai destinasi wisata. Kesakralan dan kesucian pura yang diperoleh melalui berbagai rangkaian upacara bisa saja ternodai oleh tingkah laku para wisatawan yang tidak memiliki kesadaran. Wisatawan yang berkunjung ke pura, bukan saja wisatawan yang beragama Hindu, hal inilah yang menyebabkan banyak wisatawan yang tidak paham dan tidak tahu etika masuk ke dalam pura.

Kesalahan tidak sepenuhnya bisa dilimpahkan kepada wisatawan, perlu diperhatikan juga peran dari *tour guide*, penjaga pura, dan pihak-pihak terkait. Akan tetapi, dikarenakan faktor keuntungan komersial, seakan asal wisatawan mau membayar, dipersilahkan untuk masuk ke pura tanpa memberikan pemahaman bagaimana etika masuk ke dalam pura (Kantina, 2020). Hal semacam ini menjadi noda dalam upaya menjaga kesakralan pura.

Banyak pihak yang terlibat dalam pendaulatan pura sebagai destinasi wisata kurang memahami pengelolaan yang tepat, pura sebagai destinasi wisata hanya dieksploitasi keindahan, keagungan yang membuat wisatawan tertarik tanpa teringat untuk tetap memperhatikan aspek kesakralan. Terjadinya komodifikasi pura dalam konteks ini tentunya akan lebih dominan memberikan dampak negatif (Lestari, 2020). Pura menjadi destinasi wisata ini tidak lepas dari konsep estetika yang ditawarkan, disamping juga nilai historis yang terkandung. Dalam konsep estetika hindu, sangat perlu memperhatikan *Satyam*, *Sivam* dan *Sundaram*. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut hilang, maka konsep estetika Hindu yang sarat akan "*taksu*" akan perlahan memudar.

Satyam mengacu pada kebenaran, yang mana dalam konsep pura kebenaran yang dimaksud berkaitan dengan histori, babad, atau pemujaan kepada siapa pura tersebut. Kemudian aspek *Sivam* berkaitan dengan kesucian, yang mana dari awal pemilihan tanah (lahan) saja sudah melalui prosesi yang sakral, hingga ada *pemlaspasan*, *rsi gana*, dan upacara *ngenteg linggih*. Hal ini dilakukan guna membangkitkan energi spiritual di dalam pura. Kemudian aspek *Sundaram*, adalah aspek yang menonjolkan sisi seni dalam pura, baik terkait tata letak, relief pura,

maupun kemegahan di dalam pura. Namun, konsep *Sundaram* tidak akan cukup menjadi modal membangun vibrasi spiritual dalam pura, disinilah aspek *Satyam* dan *Sivam* berperan.

Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dirasa perlu bagi para pengelola destinasi pariwisata pura. Pendidikan Agama Hindu akan menjadi modal bagi penumbuhan cara berpikir, cara bersikap dan pengambilan keputusan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata pura, termasuk para *tour guide*. Nampaknya, berbagai pelecehan pura yang dilakukan oleh para wisatawan terjadi akibat rendahnya pemahaman akan pendidikan Agama Hindu ini. Jangan sampai hanya karena tergiur dengan pemasukan dari para wisatawan, kesakralan pura menjadi aspek yang kurang dipertimbangkan.

Pendidikan Agama Hindu bagi para pengelola destinasi wisata akan menjadi landasan moral. Kesadaran bahwa menjaga kesakralan pura adalah hal terpenting. Menjadikan pura sebagai destinasi wisata tetap harus memperhatikan aspek kepatutan sesuai petunjuk sastra ataupun hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Berkaitan dengan hal tersebut maka melalui tulisan ini, penulis akan mengulas terkait pentingnya revitalisasi ajaran pendidikan Agama Hindu dalam pengelolaan pura sebagai destinasi wisata dalam konteks mencegah terjadinya desakralisasi pura.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian berupa kajian pustaka (*literature review*) yang berupaya untuk melakukan kajian dan analisis kritis terhadap data, pengetahuan ataupun konsep yang ditemukan pada berbagai *literature* yang ada. Sumber data yang digunakan berupa buku, hasil penelitian yang terpublikasi secara ilmiah, dan pemberitaan pada media online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017). Dalam penyajiannya, berbagai data dan informasi yang ada dijabarkan secara deskriptif yang dianalisis dengan berbagai teori serta konsep yang ada. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial dari William F. Ogburn, yang mana dalam konsep teorinya Ogburn menyatakan bahwa perubahan itu terjadi meliputi berbagai unsur kebudayaan baik yang sifatnya material maupun immaterial, dan cenderungnya kebudayaan material tersebutnya yang mempengaruhi perubahan yang terjadi pada kebudayaan immaterial (Ariyani & Nurcahyono, 2018).

3. Pembahasan

3.1 Pura Sebagai Destinasi Wisata

Pura sebagai tempat suci ibaratkan benteng yang berlapis-lapis mulai dari *nista mandala*, *madya mandala* hingga *utama mandala* atau sering dikenal dengan istilah *tri mandala*. Konsep ini secara filosofi berkaitan dengan keberadaan *bhuwana agung* yang terdiri dari tiga dunia, yaitu *bhur loka, bvah loka,* dan *svah loka* (Diksyiantara et al., 2016). Penataan yang spesial yang disertai dengan bentuk bangunan yang sarat akan unsur keindahan membuat pura menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Secara esensi, pura memiliki fungsi yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu, yaitu (1) tempat melakukan persembahyangan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan segala *prabhawa*-Nya, (2) Tempat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada hyang pencipta, (3) tempat berlangsungnya berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat, dan (4) tempat berlangsungnya pendidikan kehidupan bagi para calon pemimpin dan pengemuka agama/masyarakat (Wirata, 2020).

Keberadaan pura memiliki daya tarik wisata yang dimaksud adalah sebagai suatu tempat (objek) atau keadaan (situasi) yang dipandang memiliki suatu

daya magis sehingga dapat mengundang ketertarikan wisatawan untuk datang ke objek dimaksud (Wiwin et al., 2015). Pura menjadi sebuah destinasi wisata menjadi salah satu bentuk eksploitasi sumber daya yang terkesan dipaksakan guna menunjang ketersediaan lapangan pekerjaan dalam bidang pariwisata.

Tidak semua pura memang yang bisa dijadikan destinasi wisata. Biasanya pura yang dipilih adalah pura yang masuk kategori cagar budaya, karena pura yang demikian biasanya memiliki nilai historis dan filosofis. Berbicara pura yang ada di Lombok, beberapa pura yang menjadi destinasi wisata adalah pura Lingsar, Pura Suranadi, Pura Meru, Pura Narmada, Pura Batu Bolong, dan banyak pura lainnya. Kendati didaulat menjadi salah satu destinasi wisata, pura tetap saja merupakan tempat yang sakral yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat suci agama Hindu.

Pura Lingsar memiliki keunikan dibandingkan dengan pura yang lain, karena di pura ini setiap setahun sekali berlangsung tradisi yang menunjukkan kerukunan umat beragama melalui upacara perang topat (Yasa, 2020). Kemudian Pura Suranadi memiliki daya tarik akan wisata religi "*melukat*", karena disana ada lima sumber air suci (*tirta*) yaitu *tirta pebersihan, tirta pengentas, tirta patirtan, tirta penglukatan,* dan *toya tabah*. Dengan tempat mandi sakral (*melukat*) di Pura Pabersihan dan di Pura Pangentas (Gepu, 2021). Selanjutnya ada Pura Meru yang merupakan pura terbesar di Lombok yang didirikan oleh kerajaaan Singasari di Lombok. Pura ini memiliki banyak pelinggih dengan keunikannya, disamping itu pura meru bisa disebut sebagai pemersatu umat Hindu di Lombok karena diamong oleh 33 banjar (Mulyadi, 2014).

Gambar 1. Penglukatan Pebersihan Pura Suranadi
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Selanjutnya ada pura Narmada yang merupakan replika gunung rinjani yang dibangun pada masa pemerintahan raja karangasem di Lombok (Anom et al, 1996). Kemudian pura Batu Bolong yang merupakan pura yang terletak di pesisir pantai Senggigi dengan pemandangan yang begitu indah. Pura ini merupakan petapakan Dang Hyang Dwijendra yang diyakini kesuciannya (Aryaningsih et al, 2021).

Gambar 2. Pura Batu Bolong
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berkaitan dengan destinasi wisata pura ini, Emile Durkheim memandang bahwa sesuatu yang bersifat sakral harusnya dipisahkan dengan yang profan. Yang sakral diyakini akan berpengaruh lebih besar pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak, sedangkan yang bersifat profan hanya menjadi cerminan aktivitas atau keseharian masyarakat (Pals, 2012).

Pendaulatan pura sebagai destinasi wisata tentunya bukan ditentukan oleh para wisatawan, tetapi terjadi karena adanya kesepakatan antara

pengelola pura dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama dimana pura tersebut berada. Namun peran dari dinas pariwisata juga tidak bisa diabaikan. Dinas pariwisata memiliki peran dalam upaya mempromosikan termasuk mendorong para pelaku wisata untuk ikut mengembangkan potensi wisata yang ada (Tasik & Sampe, 2019).

Adanya pungutan bagi para wisatawan ketika memasuki tempat wisata termasuk ketika pura menjadi destinasi wisata, menyebabkan proses komersialisasi pura terjadi. Keuntungan materi dengan alasan agar ada pemasukan untuk pembangunan atau pelaksanaan *pujawali* pura menjadi tameng di tengah masuknya pemikiran kapitalis dalam benak para pelaku/pengelola destinasi wisata pura (I Made Gami Sandi Untara, 2020)

Kembali pada pandangan Durkheim terkait yang sakral dan yang profan, dalam pengelolaan pura, sesungguhnya antara yang sakral dan yang profan sudah dipisahkan melalui keberadaan tembok *penyengker* (Diksyiantara et al., 2016). Tembok ini menjadi pembatas antara areal yang disakralkan dan areal tidak sakral, termasuk membatasi antar *mandala*, di pura, baik antara *nista mandala* dengan *madya mandala*, ataupun antara *madya mandala* dengan *utama mandala*. Untuk pura-pura yang ada di lombok, pembagian mandala malah kebanyakan dibagi menjadi *dwi mandala*, yaitu *jaba* dan *jeroan*, atau *nista mandala* dan *utama mandala*.

Menjadikan pura sebagai destinasi wisata sering mengaburkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan. Areal sakral tentu bukan untuk konsumsi publik, berbeda dengan areal yang lain. Begitu pula berkaitan dengan etika ke tempat suci, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai karena keramahan akan datangnya para wisatawan demi kepentingan komersialisasi, keyakinan dan kesucian pura ikut digadaikan (Yoety, 2013).

3.2 Tantangan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pura

Pengelolaan Pura sebagai destinasi wisata bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mengelola destinasi wisata pura, berbeda dengan mengelola destinasi wisata alam, kuliner, kehidupan sosial ataupun tradisi. Hal ini dikarenakan konsep pura selalu dikaitkan dengan kekuatan supranatural (*niskala*) yang tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh nalar manusia.

Memang ada sisi positif yang bisa dirasakan ketika menjadikan pura sebagai salah satu destinasi wisata, salah satunya adalah perbaikan pada aspek ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan menjadikan pura sebagai destinasi wisata akan memberikan berbagai peluang bagi masyarakat sekitar, misalnya pengadaan tempat parkir, berjualan di sekitar pura, membuat penginapan dekat lokasi pura, ataupun mendirikan sebuah restoran di dekat pura tersebut (Sudiartini & ..., 2019).

Pengembangan destinasi wisata pura memang tidak terjadi hanya karena kesepakatan pihak pengelola (*pengempon*) pura. Perlu ada dukungan juga dari pemerintah terkait, sehingga hal-hal mengenai perijinan dan keamanan bisa turut dibantu. Dukungan dari pemerintah ini bisa disebut sebagai "*partnership*", yang mana berbagai ide, masukan, gagasan dan saran dari masyarakat selaku pengelola (*pengempon*) pura didengarkan oleh pihak pemerintah (Wijana, 2019).

Pura selamanya tetap berfungsi sebagai tempat suci agama Hindu, namun dalam konteks dijadikan destinasi wisata, peran puralah yang bertambah. Hal ini terjadi bersesuaian dengan konsep teori perubahan sosial yang diungkapkan oleh Ogburn, yang mana perubahan kebudayaan material akan berpengaruh besar pada perubahan kebudayaan immateriil (Ariyani & Nurcahyono, 2018). Dalam konteks ini, material yang dimaksud adalah perubahan cara hidup

dan cara penghidupan dari masyarakat. Yang mana terdahulu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris, yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, tetapi gini sudah beralih menjadi masyarakat yang lebih modern dengan mengambil berbagai bidang pekerjaan yang dianggap menguntungkan.

Salah satunya adalah komersialisasi pura sebagai dampak pengembangan pariwisata. Dengan semakin banyaknya ada destinasi wisata, maka ladang pekerjaan bagi masyarakat yang bergelut di bidang pariwisata akan semakin luas. Inilah perubahan sosial dalam perspektif Ogburn, dahulu pura yang diperankan sebagai tempat memuja kebesaran Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), kini pura juga diperankan sebagai sebuah tempat yang bisa dinikmati dari berbagai perspektif, baik historis, estetika, maupun keunikan-keunikan yang ada.

Pura sebagai destinasi wisata, apabila dijadikan sebagai pilihan melakukan wisata religi, maka dianggap sah saja, karena dalam konsep Hindupun dikenal konsep *Dharma Yatra*, yang memiliki makna melakukan kunjungan ke tempat-tempat suci. Akan tetapi menjadi sebuah kesalahan apabila kunjungan dilakukan hanya untuk rekreasi atau hiburan belaka (Damayanti, 2019).

Tantangan terbesar dalam mengelola pura sebagai destinasi wisata bukanlah terkait keberadaan tempat parkir, pedagang, penginapan ataupun restoran, tetapi bagaimana upaya yang dilakukan agar komersialiasasi pura ini tidak berdampak pada desakralisasi pura. Wisatawan yang berkunjung ke pura tentunya ada yang memang beragama Hindu, tetapi ada pula yang dari umat lain. Ketika yang berkunjung adalah umat Hindu, tentunya mereka sudah sadar dan tahu tentang etika untuk memasuki pura. Namun yang menjadi masalah adalah ketika yang berkunjung adalah wisatawan dari umat lain.

Seluruh umat memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga kesucian pura, sebagaimana dalam naskah Lontar Kramapura disebutkan bahwa seluruh kawasan suci pura telah melalui serangkaian upacara "*Bhumi Sudha*" yang berupaya untuk menghadirkan energi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan mengentaskan segala kekotoran spiritual yang ada (Titib dalam Anggarini, 2020).

Mengingat pura adalah tempat yang sakral, tentunya ada aturan-aturan yang harus diikuti ketika hendak melakukan wisata ke pura. Ada larangan masuk ke dalam pura bagi orang tertentu sebagaimana hasil Keputusan Seminar ke-IV tentang Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu tanggal 17 s/d 20 April 1978 oleh PHDI, yaitu (1) sedang haid (bagi wisatawan wanita), (2) baru selesai melahirkan ataupun habis melakukan tindakan aborsi, (3) *cuntaka* (ada kerabat meninggal), (4) tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di pura tersebut (karena pura bersifat *pingit*), (5) menderita cacat permanen, (6) menggunakan pakaian yang tidak sopan (seksi), (7) berpacaran, bertengkar, menyusui bayi, meludah, buang air dan merusak fasilitas pura, dan (8) tidak memiliki tujuan sembahyang (Anggarini, 2020).

Memperhatikan poin demi poin mengenai orang-orang yang dilarang masuk pura, maka banyak hal perlu mendapat perhatian ketika mendaulat pura sebagai destinasi wisata.

1) Tidak semua wisatawan jujur, termasuk terkait kondisi dirinya sedang haid/tidak. Sehingga sangat rawan ketika wisatawan wanita (non Hindu) dibiarkan masuk kawasan suci pura.
2) Wisatawan dalam berkomunikasi bisa saja tidak selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, dan tentunya ketika mengumpat/mengeluarkan kata-

kata tidak sopan dalam pura itu juga tidak dibenarkan.

3) Yang paling menohok adalah perihal pada poin (8), yang mana melarang orang yang tidak memiliki tujuan sembahyang untuk masuk ke dalam pura. Tentunya para wisatawan yang bukan umat Hindu, mereka masuk ke dalam pura bukan untuk tujuan sembahyang, melainkan untuk tujuan wisata (jalan-jalan).

Menghadapi realita ini, tantangan dalam pengelolaan pura sebagai destinasi wisata akan semakin terlihat. Upaya komersialisasi dan eksploitasi pura kerapkali berujung pada desakralisasi. Disinilah pentingnya peran dari para tokoh agama agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tepat bagi umat. Memberikan jalan yang bisa mengindarkan umat (pengelola pura) agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan (Wardhana & Fadhilah, 2014).

Desakralisasi pura menurut kepercayaan umat hindu dapat berpengaruh pada munculnya sebuah petaka bagi masyarakat yang menjadi pengelola (*pengamong*) pura tersebut (Wiwin et al., 2015). Petaka ini tentunya menjadi momok yang perlu diantisipasi. Kesakralan sangat berkaitan dengan ranah spiritual, dan ini tentunya tidak akan bisa dinalarkan dengan akal sehat.

Para pengelola wisata dan *pengamong* pura biasanya sudah membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah pengumuman terkait batas-batas yang boleh dilakukan oleh wisatawan di pura, misalnya hanya boleh masuk sampai kawasan *madya mandala*, tetapi kerap saja terjadi ada oknum-oknum *guide* nakal atau bahkan masyarakat lokal sendiri yang mau mengantar hanya karena diberikan tarif tertentu oleh wisatawan (Anonim, 2017).

3.3 Revitalisasi Ajaran Pendidikan Agama Hindu dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pura

Besarnya tantangan dalam mengelola pura sebagai destinasi wisata, terutama terkait kesakralan pura, perlu mendapat perhatian dari banyak pihak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan merevitalisasi ajaran Pendidikan Agama Hindu sehingga mampu memberikan landasan, pedoman dan petunjuk dalam membuat sebuah keputusan.

Ajaran Pendidikan Agama Hindu yang perlu ditekankan adalah konsep *Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha*, dan *Catur Paramita*. Tiga ajaran ini menjadi sesuluh etika dan moral dalam kehidupan termasuk dalam mengelola destinasi wisata. Destinasi wisata selalu dikorelasikan dengan ranah Pendidikan Agama Hindu, karena nilai-nilainya diyakini menjadi cara pandang masyarakat (*way of life),* kesakralan, menjalankan upacara keagamaan, berhubungan dengan dengan adat istiadat. Nilai Pendidikan Agama Hindu diyakiki menyentuh seluruh sendi yang terkait dengan kebudayaan dan juga sebagai sistem sosial dalam melandasi berbagai tindakan masyarakat (Wardhana & Fadhilah, 2014).

a. Ajaran *Tri Hita Karana*

Tri Hita Karana dimaknai sebagai tiga hubungan yang menciptakan harmonisasi dalam kehidupan, yaitu antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Gunada & Yasa, 2021). Konsep ajaran ini sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata pura.

Parhyangan

Pengelola wisata, pelaku wisata dan stake holder terkait seyogyanya diberikan pemahaman bahwa pura merupakan tempat melakukan persembahyangan, bukan tempat untuk melakukan rekreasi. Ada nilai-nilai spiritual yang harus dijaga sehingga keharmonisasn dalam hidup dapat terwujud. Diyakini apabila hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak ada

keharmonisan maka keseimbangan dalam *Bhuana Agung* bisa terjadi. Dalam Bhagavadgita VII.7 dijelaskan

> "*mattaḥ parataraṁ nānyat,*
> *kiñcid asti dhanañjaya,*
> *mayi sarvam idaṁ protaṁ,*
> *sūtre maṇi-gaṇā iva*".

Artinya:

"Tak ada yang lebih tinggi dari-Ku, wahai Arjuna, yang ada disini semua terikat pada-Ku bagaikan rangkaian mutiara pada seutas tali" (Pudja, 2021).

Petikan sloka diatas mengisyaratkan bahwa sangat penting menjaga hubungan yang harmonis dengan *hyang* pencipta, karena beliau adalah yang Maha Kuasa. Pura sebagai tempat bersthana-Nya ketika diadakan pemujaan tentunya harus dijaga kesucian dan kesakralannya.

Pawongan

Konsep *Pawongan* ini dapat didefinisikan sebagai salah satu komponen *Tri Hita Karana* yang berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dan penuh kasih diantara sesama manusia. Konsep ini sering dikaitkan dengan semboyan *saling asah, saling asih,* dan *saling asuh* (Parmajaya, 2018).

Berbicara ranah pariwisata, konsep *pawongan* terimplementasi melalui adanya komunikasi yang baik diantara pengelola wisata, *pengamong* pura, masyarakat setempat dan *tour guide*. Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan suara terkait aturan yang berlaku di pura tersebut, jangan sampai ada kerancuan yang memberikan peluang kepada para wisatawan untuk melakuan penyimpangan.

Palemahan

`Konsep *palemahan* memiliki titik berat pada upaya mewujudkan kenyamanan dan keselarasan antara manusia dengan lingkungan dimana berada (Wiguna, 2018). Dalam konteks ini, *palemahan* yang dimaksud adalah kawasan suci pura yang lebih fokus pada *nista mandala.* Dalam konteks pengembangan wisata, seyogyanya konsep ajaran *palemahan* ini menjadi acuan dalam menata dan membuat berbagai sarana prasarana penunjang destinasi wisata pura.

b. Ajaran *Tri Kaya Parisudha*

Tri Kaya Parisudha dapat diartikan sebagai tiga jenis tindakan yang harus mendapat sentuhan kesucian, dan dikategorikan sebagai perbuatan baik. Bagiannya terdiri dari berpikir yang suci (*manacika*), berkata yang suci (*wacika*), dan berbuat yang suci (*Kayika*) (Somawati & Made, 2019). Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata pura, perlu mendapat perhatian bersama bahwa seluruh stakeholder pengelola agar menjadi contoh dalam implementasi ajaran ini, kemudian dibuatkan aturan bagi wisatawan yang bersesuaian dengan ajaran *Tri Kaya Parisudha*.

Para pengelola pura, pengelola wisata, masyarakat, maupun para *tour guide* tentunya akan mau melakukan perubahan pola prilaku untuk kebaikan bersama, sebagaimana dalam Sarasamuccaya 02 dijelaskan sebagai berikut.

> "*Ri Sakwehning sarwa bhūta, iking janma wwang juga wênang gumawayakên ikang śubhāśubhakarma, kunêng panêntasakêna ring śubhakarma juga ikangaśubhakarma, phalaning dadi wwang*".

Artinya

"Diantara semua makhluk, hanya manusialah yang dapat melaksanakan (dan membedakan) perbuatan yang baik maupun yang buruk. Justru dalam melebur yang buruk menjadi baik itulah merupakan tujuan hidup (*phala*) menjadi manusia" (Sudharta, 2009).

Petikan sloka tersebut mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berubah, tidak selamanya kebiasaan buruk akan membudaya, sebaliknya kebiasaan baik juga pasti bisa dilakukan. Beberapa

tindakan menyimpang dari pengelola destinasi wisata pura bersama stakeholder agar diperbaiki untuk memberikan penghargaan pada tempat suci sendiri dan menjadi contoh bagi para wisatawan.

c. Ajaran *Catur Paramita*

Ajaran *Catur Paramita* merupakan salah satu konsep ajaran Hindu yang termuat dalam Teks Tatwadjnyana, yang mana dalam konsep ajarannya terkandung empat sikap mulia yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam berprilaku (Sudiarta, 2020). Adapun bagian-bagian dari ajaran *Catur Paramita* ini ada empat, yaitu sikap berteman dalam upaya memanusiakan manusia yang lain (*maitri*), sikap cinta kasih yang didasarkan atas keteguhan dan ketulusan hati (*karuna*), sikap saling memahami yang mampu mendorong motivasi (*mudita*), dan sikap saling menghargai yang menuntun aktualisasi diri (*upeksa*) (Rudiarta, 2020).

Berkaitan dengan realisasi konsep ajaran catur paramita ini, dalam Sarasamuccaya 156 dituliskan sebagai berikut.

> "*Matangnyan nihan kadakêning wwang, tan wāk, kāya, manah, kawarjanā makolahang aśubhakarma, apan ikang wwang mulahakê ikang hayu, hayu tinêmunya, yapwan hala pinakolahnya, hala tinêmunya.*"

Artinya

"Oleh Karenanya beginilah yang harus diusahakan oleh orang-orang yaitu jangan ada ucapan, perbuatan atau pikiran yang menyakiti hati, yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik, sebab orang yang berbuat baik, baik pula yang didapatinya, sedangkan kalau berbuat tidak baik, maka tidak baik pulalah yang akan didapatinya"(Sudharta, 2009).

Petikan sloka diatas mengisyaratkan bahwa realisasi ajaran *catur paramita* harus mengacu pada ajaran *Tri Kaya Parisudha*, sehingga mampu membawa kedamaian bagi semua orang. Dikaitkan dengan pengelolaan pura sebagai destinasi wisata, konsep ajaran *catur paramita* ini dapat menjadi landasan bagi para pengelola dalam melakukan hubungan dengan stakeholder. Apabila komunikasi yang dilakukan dalam kaitan dengan pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan pendekatan yang tepat (merujuk konsep ajaran *Catur Paramita*) maka penekanan nilai agama hindu dalam pengelolaan destinasi wisata akan dapat dilakukan atas dasar kebersamaan dan kepentingan yang lebih luas.

Pentingnya peran Pendidikan Agama Hindu dalam menjaga kesakralan pura perlu menjadi perhatian bersama, sehingga pengelolaan destinasi ini memiliki pondasi yang kuat. Adapun hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan destinasi wisata pura adalah sebagai berikut.

1) Pengelolaan Destinasi Wisata Pura harus melibatkan cendikiawan Hindu,
2) Mengedepankan konsep *Tri Hita Karana* dalam pengelolan Pura,
3) Membuat Pengumuman terkait etika berkunjung ke destinasi wisata pura dengan mengedepankan implementasi ajaran *Tri Kaya Parisudha*,
4) Komunikasi antar pihak yang berkepentingan dilakukan dengan baik dengan mengedepankan pendekatan *Catur Paramita*,
5) Memberikan sosialisasi kepada para *Tour Guide* agar memahami keistimewaan destinasi wisata pura, sehingga harus direspons dengan cara berkunjung yang istimewa dari para wisatawan,
6) Melarang dengan keras wisatawan masuk ke dalam *utama mandala* pura dengan alasan apapun kecuali sembahyang, yang disiasati dengan membuat miniature replika pura.

3. Simpulan

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan destinasi wisata. Destinasi wisata tersebut dimulai dari alam, budaya, maupun tempat-tempat yang memiliki nilai historis. Pura sebagai

tempat suci agama Hindu merupakan tempat yang tidak saja sarat akan nuansa sakral, tetapi memiliki nilai historis dan bentuk yang menawan sebagai wujud implementasi konsep *Sivam, Satyam,* dan *Sundaram*. Hal ini memicu banyak pura didaulat menjadi destinasi wisata demi menarik kunjungan dari wisatawan. Akan tetapi, kerapkali hal ini malah menjerumus ke arah komersialisasi pura dan mengeksploitasi potensi wisata pura tanpa diimbangi kesadaran bahwa pada hakikatnya pura dalah tempat suci.

Ketidaksadaran dari pihak pengelola maupun dari pihak wisatawan, menyebabkan terjadinya beberapa kasus pelecehan pura dan pelanggaran etika masuk pura sebagai mana yang telah disepakati dalam Seminar ke-IV tentang Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu oleh PHDI. Akhirnya seringkali terjadi proses desakralisasi pura yang dampaknya dirasakan oleh umat Hindu *pengamong* pura. Atas dasar tersebut, perlu adanya revitalisasi ajaran Pendidikan Agama Hindu kepada seluruh pengelola dan stakeholder terkait terutama melalui penekanan kesadaran akan konsep *Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha*, dan *Catur Paramita*. Dengan ajaran-ajaran tersebut, diharapkan para pelaku wisata memiliki pondasi yang kuat, sehingga ke depannya kesakralan (kesucian) pura tetap dapat terjaga kendati menjadi destinasi wisata.

Daftar Pustaka

Anggarini, P. M. R. (2020). Etika di Tempat Suci menurut Lontar Kramapura. Sanjiwani: Jurnal Filsafat, 10(2), 135-146.

Anom, I.G.N, dkk. (1996). *Hasil Pemugaran dan Temuan Benda Cagar Budaya*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Anonim. (2017). Perlu Ketegasan Aturan Wisatawan Masuk Pura tersedia di http://bisnisbali.com/perlu-ketegasan-aturan-wisatawan-masuk-pura/. Akses pada tanggal 17 Maret 2022.

Ariyani, N. I., & Nurcahyono, O. (2018). Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17442

Aryaningsih, D. R., Armayani, N. M. R. T., Laksmi, I. A. W., & Diatmika, G. E. P. (2021). Adaptasi Konsep Purusa-Prakerti Pada Pura Dang Kahyangan Kaprusan Dan Batu Bolong Di Batu Layar Lombok Barat. Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 12(2), 1-18.

Damayanti, S. P. (2019). Fasilitas Pendukung Destinasi Wisata Religi di Kawasan Senggigi Lombok Barat 2018. Media Bina Ilmiah, 13(6), 1281-1292.

Diksyiantara, I. B. G. E., Punia, I. N., & Kamajaya, G. (2016). Tajen & Desakralisasi Pura: Studi Kasus di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali. Jurnal Ilmiah Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 1–16. https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/download/20243/13407

Gepu, D. M. (2021). Eksistensi Ritual Melukat di Pura Suranadi Pada Masa Pandemik Covid-19. Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 24-30.

Gunada, I. W. A., & Yasa, I. M. A. (2021). Implementation Of Tri Hita Karana Value Through Community Service In Batu Bolong Temple, West Lombok Regency. Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies, 5(1), 147-158.

I Made Gami Sandi Untara, W. S. (2020). Eksistensi Pura Tanah Lot Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Tabanan. Cultoure …,

1(2), 186–197. http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/cultoure/article/view/833

Kantina, I. K. A. D. (2020). Pura Tirta Empul: Antara Tempat Suci Versus Destinasi Wisata Komersial (Kasus Komodifikasi Pura Khayangan Di Desa Manukaya Tampak Siring, Gianyar Bali) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Lestari, M. N. D. (2020). Pelestarian dan Komersialisasi Pura Tirta Empul, Desa Manukaya, Kabupaten Gianyar: Kajian Komunikasi Massa. Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 88-94.

Mulyadi, L. (2014). Sejarah Gumi Sasak Lombok, tersedia di http://arsitektur-lalu.com/wp-content/uploads/2016/09/Buku-Sejarah-Lombok-OK.pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Pals, D. L. (2012). *Seven Theories of Religion*. Terjemahan: Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCISoD.

Parmajaya, I. P. G. (2018). Implementasi konsep Tri Hita Karana dalam perspektif kehidupan global: Berpikir global berperilaku lokal. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya, 2(2), 27-33.

Pudja. G. (2021). *Bhagavad Gītā (Pañcama Veda)*. Surabaya: Paramita.

Rudiarta, I. W. (2020). Catur Paramita Sebagai Pendekatan Latihan Yoga Asana di STAHN Gde Pudja Mataram. Media Bina Ilmiah, 14(11), 3345-3356.

Somawati, A. V., & Made, Y. A. D. N. (2019). Implementasi Ajaran Tri Kaya Parisudha Dalam Membangun Karakter Generasi Muda Hindu Di Era Digital. Jurnal Pasupati Vol, 6(1).

Sudharta, T. R. (2009). *Sārasamuccaya Smerti Nusantara*. Surabaya: Paramita.

Sudiarta, I. W. (2020). Ajaran Agama Hindu Dalam Teks Tatwadjnyana. Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 56-67.

Sudiartini, N. W. A., & ... (2019). Strategi Pengembangan Wisata Spiritual Pura Dalem Balingkang di Desa Pinggan Kecamatan Kintamani. Forum Manajemen …, 17, 122–134. https://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/FM/article/view/337

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatfi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujana, I. M. P. (2018). Strategi Konservasi Bhisama Kesucian Pura Pada Kawasan Cagar Budaya Taman Narmada Dalam Merespons Perkembangan Pariwisata Budaya di Lombok Barat. Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 9(2), 1760-1782.

Supartika, P. (2019). 3 Kasus Bule Lecehkan Tempat Suci di Bali yang Viral Dua Tahun Belakangan Ini, tersedia di https://bali.tribunnews.com/2019/08/13/tribun-wiki-3-kasus-bule-lecehkan-tempat-suci-di-bali-yang-viral-dua-tahun-belakangan-ini?page=all. Akses pada tanggal 13 Maret 2022

Tasik, V. R., Sambiran, S., & Sampe, S. (2019). Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).

Utama, I. P. S. J., & Wiguna, I. M. A. (2020). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Wisata Yoga Sebagai Produk Pariwisata Spiritual. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya, 5(1), 42–48. https://doi.org/10.36275/mws

Wardhana, K., & Fadhilah, A. (2014). Pariwisata Dan Eksistensi Pendidikan Agama Dalam Bingkai Budaya Pulau Dewata (Analisis

Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendidikan Agama Masyarakat Denpasar Bali). SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 1(2). https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1260

Wiguna, M. O. C. (2018). Memahami Pertalian Desa Pakraman di Bali dengan Karang Ayahan Sebagai Bagian Dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana. Jurnal Panorama Hukum, 3(2), 125-140.

Wijana, P. A. (2019, December). Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pura Puseh Dan Pura Desa Di Desa Batuan Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Gianyar, Bali. In Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management (Vol. 2, No. 1, pp. 19-34).

Wirata, I. W. (2020). Tantangan Socio-Cultural Bali Sebagai Daya Dukung Pariwisata Lombok. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan …, 3(2), 392–403. http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/509%0Ahttp://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/509/504

Wiwin, W., Dharma, F., & Ihdn, D. (2015). Permasalahan Dalam Pemanfaatan Warisan Cagar Budaya. 55–61.

Yasa, I. M. A. (2020). Upacara Perang Topatdi Pura Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Media Bina Ilmiah, 14(9), 3179-3190.

Yoety. O. A. (2013). *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*. Bandung: Angkasa.